

LAMPIRAN - LAMPIRAN

SURAT JALAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT "A"

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET/ 251 / IX /2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama | : Dr. Susilo Adi Purwantoro, S.E., M.Eng., Sc., CIQnR., CIQaR., IPU |
| b. Pangkat / Golongan | : Mayor Jenderal TNI |
| c. Jabatan | : Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan |
| d. Kesatuan | : Universitas Pertahanan RI |

Menerangkan bahwa mahasiswa Prodi Ekonomi Pertahanan TA 2020/2021

- | | |
|------------------|----------------------|
| a. Nama | : Hanri Jan Piter |
| b. NIM | : 120200203006 |
| c. Program Studi | : Ekonomi Pertahanan |

Saat ini yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa Penerima Beasiswa S-2 Kementerian Pertahanan pada Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan RI TA. 2020/2021. Surat ini dibuat untuk keperluan administrasi penelitian tesis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 September 2021

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan RI
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan,



Dr. Susilo Adi Purwantoro, S.E., M.Eng. Sc.,
CIQnR., CIQaR., IPU
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Kasatwas Unhan RI
3. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan RI.

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 2068 /X/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data.

Jakarta, 4 Oktober 2021

Kepada

Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

di

Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan RI, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI atas nama Hanri Jan Piter, NIM: 120200203006, nomor HP: 0852-3268-2541 email: jpcoon87@gmail.com bermaksud melakukan penelitian dengan judul: "Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pengawasan Bantuan Sosial Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan".
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon di izinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian di Kantor Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat terkait baik secara langsung maupun secara Daring melalui zoom.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia

Wakil I Bid Akademik dan Kemahasiswaan,



Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Warek II dan Warek III Unhan RI
3. Ketua LPPM Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Kepala RPKP



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/2968 /X/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data.

Jakarta, 4 Oktober 2021

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi DKI Jakarta

di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan RI, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI atas nama Hanri Jan Piter, NIM: 120200203006, nomor HP: 0852-3268-2541 email: jpcoon87@gmail.com bermaksud melakukan penelitian dengan judul: "Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pengawasan Bantuan Sosial Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Pertahanan Nimmiliter Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan".
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat terkait baik secara langsung maupun secara Daring melalui zoom.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Warek I Bid Akademik dan Kemahasiswaan.



Dj. John Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Warek II dan Warek III Unhan RI
3. Ketua LPPM Unhan RI
4. Kasabwas Unhan RI
5. Kepala BPKP Pusat.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT "A"

Nomor : B/ 2968 /IX/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan
Permintaan Data.

Jakarta, 4 Oktober 2021

Kepada

Yth. Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi,
Kementerian Sosial
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan RI, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI atas nama Hanri Jan Piter, NIM: 120200203006, nomor HP: 0852-3268-2541 email: jpcoon87@gmail.com bermaksud melakukan penelitian dengan judul: "Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pengawasan Bantuan Sosial Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan".
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kementerian Sosial dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat terkait baik secara langsung maupun secara Daring melalui zoom.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Wakil I Bid Akademik dan Kemahasiswaan,




Dr. Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Warek II dan Warek III Unhan RI
3. Ketua LPPM Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
Terakreditasi BAN-PT 'A'

Nomor : B/ 2968 /X/2021
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data.

Jakarta, 4 Oktober 2021

Kepada
Yth. Kepala Suku Dinas Sosial
Pemprov DKI Jakarta
di
Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan TA. 2020/2021.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan RI, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI atas nama Hanri Jan Piter, NIM: 120200203006, nomor HP: 0852-3268-2541 email: jpcoon97@gmail.com bermaksud melakukan penelitian dengan judul: "Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pengawasan Bantuan Sosial Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan".
3. Berkenaan dengan hal tersebut, mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian di Kantor Suku Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat terkait baik secara langsung maupun secara Daring melalui zoom.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Wakil I Bid Akademik dan Kemahasiswaan,



Jona Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Warek II dan Warek III Unhan RI
3. Ketua LPPM Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Gubernur Prov. DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan.

DAFTAR NARASUMBER MELALUI SURAT, ONLINE DAN OFFLINE BAIK SECARA FORMAL ATAU INFORMAL

1. Anggota Komisi XI DPR RI tentang Pengawasan Keuangan yaitu M. Misbakhun
2. Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
3. Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana, BPKP
4. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial, BPKP
5. Kordinator Pengawasan PIPP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, BPKP
7. Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Kementerian Sosial yaitu Heri Kris Sritanto
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Kementerian Sosial
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Sosial
10. Sekertaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial yaitu Osep Mulyani
11. Dosen S3/ Akademi, Universitas Trisakti Jakarta yaitu Antar Sianturi
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan yaitu Munawaroh
14. Kepala Satuan Pelayanan Sosial Kecamatan Cilandak
15. Kepala Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Labu
16. Ketua Rw.09 Pondok Labu
17. Ketua RT.09 Pondok Labu

PANDUAN WAWANCARA

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

**PRODI EKONOMI PERTAHANAN
FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI**



**PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DALAM PENGAWASAN BANTUAN SOSIAL PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA PERTAHANAN
NIRMILITER DARI PERSPEKTIF
EKONOMI PERTAHANAN**

A. Informasi Umum

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Peneliti : Hanri Jan Piter
NIM : 120200203006
Prodi : Ekonomi Pertahanan
Fakultas Manajemen Pertahanan,
Universitas Pertahanan RI
Alamat : Universitas Pertahanan,
Kawasan IPSC Sentul.
Kec. Citeureup, Kab. Bogor,
Provinsi Jawa Barat

B. Identitas Informan

Nama Lengkap (beserta gelar) :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja/Instansi :
Kantor :
Pendidikan Terakhir : SMU/Akademi/S1/S2/S3*
Nomor Telepon/Handphone :

* coret yang tidak perlu

Tanda tangan

C. **Gambaran Panduan Wawancara**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi di masa sekarang. Kemudian data penelitian didapat melalui pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data yang telah diperoleh nantinya akan dianalisis melalui proses triangulasi.

Berdasarkan fokus penelitian ini dianalisis berdasarkan tiga rumusan masalah yang mana memiliki dasar yang telah dipaparkan di atas. Yang pertama adalah Bagaimana **Peran** BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari Perspektif Ekonomi Pertahanan. Kedua adalah Bagaimana **Kendala** BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari Perspektif Ekonomi Pertahanan. Terakhir adalah Bagaimana **Upaya** terbaik yang dilakukan BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari Perspektif Ekonomi Pertahanan.

Tabel 1: Subyek Penelitian atau Informan

No	Jabatan	Instansi
1		
2		
3		

Tabel 2 : Pertanyaan Objek BPKP

Rumusan Masalah	Pertanyaan Wawancara
Bagaimana Peran BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peranan BPKP dalam pengawasan bantuan sosial? 2. Bagaimana Perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan tim pengawasan bansos dalam masa pandemi? 3. Apa tanggapan BPKP mengenai tertangkapnya Menteri Sosial, PPK dan pejabat lainnya oleh KPK? Apakah BPKP mengetahui mengenai <i>fraud</i> yang terjadi sebelum mereka tertangkap? 4. Mengapa kesannya BPKP kurang mempublikasi hasil pengawasannya kepada media?
Bagaimana Kendala BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan	Apa kendala yang dihadapi BPKP dalam penugasan pengawasan bantuan sosial?
Bagaimana Upaya BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial masa pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kegiatan pengawasan bantuan sosial dilakukan masa pandemi covid-19? 2. Upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan kegiatan bantuan sosial tepat sasaran?

Jakarta, 2021

Peneliti,

**Hanri Jan Piter
NIM. 120200203006**

Tabel 3 : Pertanyaan Objek Kementerian Sosial

Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana Peranan Inspektorat dalam pengawasan bantuan sosial?
2. Bagaimana Perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan tim pengawasan bansos dalam masa pandemi?
3. Apa tanggapan Inspektorat Kementerian Sosial mengenai tertangkapnya Menteri Sosial, PPK dan pejabat lainnya oleh KPK? Apakah mengetahui mengenai <i>fraud</i> yang terjadi sebelum mereka tertangkap?
4. Apa kendala yang dihadapi Kementerian Sosial dalam database keluarga penerima manfaat bantuan sosial?
5. Upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan kegiatan bantuan sosial tepat sasaran?
6. Bagaimana Tanggapan saudara mengenai pihak eksternal (BPKP) dalam pengawasan Bantuan Sosial?

Jakarta, 2021
Peneliti,

Hanri Jan Piter
NIM. 120200203006

Tabel 4 : Pertanyaan Objek Suku Dinas Sosial

Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana Peranan Suku Dinas Sosial dalam bantuan sosial masa pandemi?
2. Apa kendala yang dihadapi Suku Dinas Sosial dalam <i>database</i> keluarga penerima manfaat bantuan sosial?
3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan kegiatan bantuan sosial tepat sasaran?
4. Bagaimana Tanggapan saudara mengenai pihak eksternal (BPKP) dalam pengawasan Bantuan Sosial?

Jakarta, 2021
Peneliti,

Hanri Jan Piter
NIM. 120200203006

DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi Penelitian dengan Teknik Observasi dan Wawancara

	
<p>Kordinator Pengawasan/ Kabid PIPP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta</p>	
	
<p>Sekretaris Kaper BPKP DKI Jakarta</p>	
	
<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, BPKP</p>	



Kepala Sub Direktorat Pengawasan
Bidang Perlindungan Sosial, BPKP



Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin
Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan



Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Sosial
Jakarta Selatan



Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi, Kementerian Sosial



Kementerian Sosial



FGD dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



Kepala Satuan Pelayanan Sosial Kecamatan Cilandak



Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Labu



Keluarga Penerima Manfaat



Distribusi Bansos

SURAT JAWABAN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Prapanca Raya No.9 Blok. C Lt. 5, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp. (021) 7394238
Fax (021) 7394238 Email : sosialjs@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos 12170

Nomor : **2524 /-1.846**
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

4 November 2021

Kepada
Yth. Rektor Universitas Pertahanan RI

di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pertahanan Republik Indonesia Jakarta Nomor : B/2968/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Permohonan Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberi izin kepada:

Nama : Hanri Jan Piter

NIM : 120200203006

Judul Tesis : **Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pengawasan Bantuan Sosial Masa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Pertahanan Nirmileter dari Persepektif Ekonomi Pertahanan**

Untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data terkait judul skripsi diatas dengan ketentuan :

1. Menerapkan Protokol Kesehatan dalam mengumpulkan data di lapangan
2. Melaporkan hasil penelitian kepada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Kepala Suku Dinas Sosial
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sahriul, S. Sos, M.Si
NIP.196607041989031006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor: 2825 /-1.846

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Sahrul,S,Sos,M.Si
Jabatan : Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Hanri Jan Piter
NIM : 120200203006
Jurusan : Program Studi Ekonomi
Fakultas : Manajemen Pertahanan Unhan RI
Judul Tesis : Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Pengawasan Bantuan Sosial Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter dari Perspektif Ekonomi Pertahanan

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dengan metode wawancara langsung di Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 4 November 2021

Kepala Suku Dinas Sosial
Kota Administrasi Jakarta Selatan


Sahrul, S. Sos, M.Si
NIP 196607041989031006

SURAT ELEKTRONIK TANGGAPAN DINAS SOSIAL

2 of 30

to me

Selamat sore Bapak Harry Jan Pifer, berkenaan dengan formulir permohonan informasi saudara dengan No. Pendaftaran 202100519, berikut kami informasikan terkait dengan jawaban atas pertanyaan saudara sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Sosial dalam bantuan sosial masa pandemi?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sejumlah program bantuan sosial, seperti Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJIMU), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang bersumber dari APBD, dan Pangan Murah. Selain program tersebut, dalam rangka perlindungan sosial dari dampak pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat bersinergi dalam pemberian bantuan sosial dalam bentuk sembako di tahun 2020 dan di tahun 2021 dalam bentuk bantuan sosial tunai.
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam database keluarga penerima manfaat bantuan sosial?
Sejauh ini Penerima BST merupakan keluarga penerima bantuan sosial sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pemadanan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Tidak termasuk penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersurat kepada Menteri Sosial RI untuk meminta data penerima Bantuan Sosial yang berasal dari Kementerian Sosial sehingga setelah data penerima Bantuan Sosial bisa didapatkan maka akan dilaksanakan pemadanan data oleh Pusdatin Jamsos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk menghindari duplikasi penerima program.
3. Upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan kegiatan bantuan sosial tepat sasaran?
Daftar penerima manfaat bantuan sosial bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data tersebut merupakan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pendamping Sosial Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas Sosial. Dinas Sosial sendiri juga melaksanakan pendaftaran aktif DTKS yang dibuka untuk masyarakat umum melalui online.
4. Bagaimana Tanggapan saudara mengenai pihak eksternal (BPKP) dalam pengawasan Bantuan Sosial?
Pihak eksternal dalam melakukan pengawasan yang sangat baik dalam pelaksanaan program, dan hal ini tentu sangat membantu untuk transparansi pelaksanaan program Bantuan Sosial yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

atas perhatiannya diucapkan terimakasih

SURAT ELEKTRONIK TANGGAPAN KEMENTERIAN SOSIAL

PPID Kemsos

Thu, Nov 11, 12:43 PM (4 days ago)

to me

Kepada Yth. Pemohon Informasi

Terima kasih telah menggunakan layanan informasi PPID Kementerian Sosial RI, permohonan Informasi Publik dengan nomor : 336/WEB/PPID/KEMENSOS/TB/271021 tanggal 11 November 2021, bersama ini kami sampaikan bahwa permintaan saudara sebagaimana yang ditujukan kepada Ibu Menteri Sosial masih kami proses untuk ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial selaku PPID Pelaksana, oleh karena itu, mohon kiranya untuk menunggu hingga perwakilan kami menghubungi pemohon informasi.

Atas perhatian disampaikan terima kasih.

[Tim Layanan Online PPID Kementerian Sosial RI](#)

SURAT TANGGAPAN KEMENTERIAN SOSIAL



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 3103591 <http://www.kemensos.go.id>

Nomor : 433/1/DI.02/1/2022
Sifat : Biasa
Lampiran: 1 Berkas
Hal : Penyampaian Informasi Publik

12 Januari 2022

Yth :
Sdr. Hanri Jan Piter

di -
Tempat

Menindaklanjuti permohonan informasi publik dari Saudara Hanri Jan Piter melalui PPID Kementerian Sosial RI dengan nomor registrasi 336/WEB/PPID/KEMENSOS/TB/271021, tanggal 11 November 2021, bersama ini kami sampaikan informasi yang diminta *terlampir*.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Harry Hikmat

TANGGAPAN WAWANCARA KEMENTERIAN SOSIAL

TANGGAPAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pertanyaan : Bagaimana Peranan Inspektorat dalam pengawasan bantuan sosial?
- Tanggapan : Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial terhadap pengawasan bansos yaitu:
- a. Sebagai Quality Assurance.
Peran ini dilakukan melalui reviu anggaran, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bansos di lapangan. Dalam masa pandemi covid 19, dimana ada keterbatasan pergerakan dan himbauan utk WFH, maka dalam pelaksanaan reviu anggaran Inspektorat Jenderal menerapkan kebijakan reviu dapat dilaksanakan secara WFO dan WFH. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan terbatas pada daerah tertentu dan dengan personil yang terbatas. Sedangkan untuk reviu pengadaan barang dan jasa atas kewajaran harga Inspektorat Jenderal akan melakukan setelah ada permintaan dari KPA/PPK setelah proses pembayaran selesai dilaksanakan.
 - b. Sebagai Advisory Manajemen
Peran ini dilakukan dengan cara melaksanakan pendampingan atau pemberian masukan atas pelaksanaan penyaluran bansos. Mulai tahap perencanaan anggaran dan pengadaan, koordinasi dengan APH, pemda dan pilar sosial, sampai pada saat penyaluran.
2. Pertanyaan : Bagaimana perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan tim pengawasan bansos dalam masa pandemi?
- Tanggapan : Untuk perencanaan atau Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, yang semula lebih banyak dilakukan secara tatap muka akhirnya lebih banyak dilaksanakan secara virtual. Sedangkan untuk pengawasan pengawasan mengoptimalkan alokasi yang ada setelah adanya optimalisasi anggaran pengawasan untuk penanganan Covid-19 baik untuk internal Inspektorat Jenderal, Kementerian Sosial maupun PAGU bantuan sosial.
3. Pertanyaan : Apa tanggapan Inspektorat Kementerian Sosial mengenai tertangkapnya Menteri Sosial, PPK dan Pejabat lainnya oleh KPK? Apakah mengetahui mengenai *fraud* yang terjadi sebelum mereka tertangkap?
- Tanggapan : Atas kejadian OTT, pada dasarnya kami prihatin dengan kejadian tersebut dan ini menjadi pelajaran yang sangat

berharga dan mahal karena di tengah Pandemi Covid-19 dan banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan justru terjadi tipikor yang melibatkan orang-orang/pejabat yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengadaan bansos.

Fraud yang terjadi justru di luar dari system yang selama ini dibangun. Namun dikarenakan sistem pengadaan yang dianggap darurat, maka penunjukan vendor secara langsung menjadi peluang adanya penyimpangan ditambah dengan adanya kelangkaan beberapa item barang di pasaran karena *supply* dari pabrikan atau distributor terbatas, maka peluang terjadinya kolusi menjadi semakin besar dan itu dilakukan oleh pihak Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen.

4. Pertanyaan : Apa kendala yang dihadapi Kementerian Sosial dalam database keluarga penerima manfaat bantuan sosial?
- Tanggapan : Kendala yang dihadapi atas *database* keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata banyak daerah/pemda yang tidak aktif memuktahirkan warganya termasuk di DKI Jakarta sendiri pada saat hanya menetapkan data globalnya saja sehingga manakala ditelusuri tidak sebanyak jumlah data yang disampaikan. Ditambah pergerakan warga pada masa pandemi banyak berpindah ke daerah asal. Akibatnya, di lapangan terjadi ada warga yang tidak dapat bantuan sosial, ada warga yang mendapat bansos *double*. Upaya yang dilakukan pada saat itu agar tidak terjadi permasalahan sosial pihak setempat adalah dengan membagikan bantuan tersebut secara merata. Selain itu, permasalahan lainnya adalah adanya KPM yang terdata, tetapi ternyata sudah meninggal atau pindah sehingga tidak dapat ditelusuri orangnya.
5. Pertanyaan : Upaya apa yang dilakukan untuk memastikan kegiatan bantuan sosial tepat sasaran?
- Tanggapan : Adanya pemadanan data dengan pihak Disdukcapil sehingga DTKS berbasis NIK, dan bagi warga yang belum memiliki NIK di bantu prosesnya. Bagi data yang masuk kategori bermasalah, maka terdapat data yang ditidurkan sampai ada proses verifikasi dan validasi dari pihak pemda setempat. Untuk verifikasi dan validasi data yang semula 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali setahun akhirnya dirumah menjadi 1 bulan sekali. Dan pihak pemda dalam hal ini Dinsos setempat didorong untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi data warganya yang masuk DTKS.

6. Pertanyaan : Bagaimana tanggapan saudara mengenai pihak eksternal (BPKP) dalam pengawasan Bantuan Sosial?
- Tanggapan : BPKP berperan sebagai eksternal Kementerian dan Internal Pemerintah, dengan SDM yang berkualitas dan tersebar di kantor perwakilan yang ada di Provinsi. Pada saat penyaluran bansos membantu dengan sama mengawal program ini terlaksana dengan baik. Keberadaan perwakilan BPKP di setiap provinsi membantu mengawasi bantuan sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum bisa sepenuhnya dapat dijangkau oleh Inspektorat Jenderal dikarenakan keterbatasan SDM dan Anggaran.

A.n. Sekretaris Inspektorat Jenderal,
Kabag Umum



Osep Mulyani

SURAT TANGGAPAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 8591 0031, Faksimile (021) 8591 0030
Website: <http://www.bpkp.go.id>, Email: humas@bpkp.go.id

Nomor : S-1085/SU04/3/2021 17 Desember 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Jawaban Pertanyaan
Wawancara untuk penyusunan Tesis
Mahasiswa Fakultas Manajemen
Pertahanan, Universitas Pertahanan a.n.
Hanri Jan Piter

Yth. Hanri Jan Piter
Di tempat

Sehubungan dengan permohonan informasi Saudara melalui laman PPID BPKP tanggal 27 Oktober 2021 mengenai Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data, bersama surat ini kami sampaikan jawaban dari unit teknis terkait sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Biro,



Tembusan Yth.
1. Sekretaris Utama BPKP
2. Rektor Unhan RI



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA
Jln. Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, Telp. 8584862, Fax. 85905504, 85910031 (Hunting)
Website <http://www.bpkp.go.id> email : deputi2@bpkp.go.id

Nomor : S-524/D203/1/2021

15 Desember 2021

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Penyampaian Jawaban Pertanyaan Wawancara
untuk penyusunan Tesis Mahasiswa Fakultas
Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan
atas Nama Hanri Jan Piter.

Yth. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor S-942/SU04/3/2021 Tanggal 02 November 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian (Wawancara) dan Permintaan Data c.q Surat Rektor Universitas Pertahanan RI Nomor B/2968/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data, dengan ini kami sampaikan Jawaban atas Pertanyaan Wawancara yang dapat disampaikan sebagai bahan penyusunan Tesis Mahasiswa Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan atas Nama Hanri Jan Piter, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pih. Direktur

Faeshol Cahyo Nugroho
NIP. 19730607 199302 1 001

TANGGAPAN WAWANCARA BPKP

Lampiran S-524/D203/1/2021
Tanggal 15 Desember 2021

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

1. Bagaimana Peranan BPKP dalam Pengawasan Bantuan Sosial?

Jawab:

Dalam hal pengawasan Bantuan Sosial, BPKP telah melaksanakan berbagai peran dan Fungsi Pengawasan, baik atas Penyaluran Bantuan Sosial Reguler (PKH dan Sembako), maupun bantuan sosial yang disalurkan hanya saat pandemic, diantaranya:

- a. Penyampaian Atensi Mengenai Hasil Identifikasi dan Mitigasi Risiko Penyaluran Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Dampak COVID-19;
- b. Penyampaian Atensi mengenai Potensi Cakupan Penerima Bantuan Sosial dengan mempertimbangkan Alokasi Anggaran Bantuan Sosial yang berasal dari APBN, APBD dan Dana Desa;
- c. Penyampaian Atensi mengenai hasil pengolahan data usulan calon Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Pemerintah Daerah;
- d. Penyampaian Atensi mengenai irisan data penerima bansos PKH, BPNT, BST, dan BLT-DD;
- e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Bantuan Sosial Beras (BSB) bagi KPM PKH;
- f. Penyampaian Atensi mengenai Validitas Data Penerima Bantuan Sosial PKH, BPNT dan BST (NIK tidak standar, Data Ganda, dsb);
- g. Penyampaian Laporan Hasil Audit atas Penyaluran Bantuan Sosial BST;
- h. Penyampaian laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako (Banpres) Jabodetabek;
- i. Penyampaian Atensi mengenai Hambatan dan Permasalahan dalam proses perbaikan data dan Penilaian Kelayakan KPM Bantuan Sosial di Daerah.

BPKP juga secara rutin telah melakukan kegiatan consulting terkait penyusunan "New DTKS", dan Menjadi katalis percepatan penyaluran KKS bermasalah.

2. Bagaimana Perencanaan dan Penganggawan dalam Penyusunan Tim Pengawasan Bansos dalam masa pandemi?

Jawab:

Di masa awal Pandemi COVID-19, Pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial di masa pandemi (Penggenapan PKH, Perluasan BPNT, Penyaluran BST, Penyaluran Bansos Sembako Jabodetabek dan Penyaluran Bantuan Sosial Beras) memang belum direncanakan dan dianggarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) BPKP, karena terjadinya Pandemi tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Namun demikian, sesuai dengan prinsip "Agile Auditor" yang dianut oleh BPKP, dimana pelaksanaan penugasan dapat dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan stakeholders utama BPKP (Presiden) tanpa perlu 100% terpaku kepada rencana kerja yang telah dituangkan dalam PKPT. Maka BPKP dengan segala keterbatasan SDM (adanya kebijakan PSBB) dan Anggaran (refocusing anggaran), tetap

melaksanakan Pengawasan atas Penyaluran Bantuan Sosial di masa pandemi dengan penyesuaian terhadap metodologi dan Langkah kerja pengawasan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

3. Apa Tanggapan BPKP Mengenai tertangkapnya Menteri Sosial, PPK dan Pejabat lainnya oleh KPK? Apakah BPKP mengetahui mengenai fraud yang terjadi sebelum mereka tertangkap?

Jawab:

BPKP tidak memberikan tanggapan mengenai tertangkapnya Menteri Sosial, PPK dan Pejabat lainnya oleh KPK, namun demikian dalam Menyusun Program dan Langkah Kerja Pengawasan Program Bantuan Sosial, BPKP selalu mempertimbangkan risiko-risiko terkait pelaksanaan Program, termasuk adanya risiko fraud.

4. Bagaimana BPKP mengatur SDM pengawasan dengan lingkup penugasan bantuan sosial yang banyak?

Jawab:

Untuk mengatasi Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan Pengawasan Bantuan Sosial yang ada di Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana sebagai pengampu Kementerian Sosial, BPKP juga melibatkan SDM dari Unit Kerja Lain, seperti dari Tim Data Forensik dari Deputi Investigasi untuk melakukan pengujian dan penelaahan data dan Tim dari Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dari Deputi Akuntan Negara untuk melakukan pengawasan terhadap BUMN Bank Penyalur, PT.Pos Indonesia dan juga Perum BULOG.

Selain itu, untuk meminimalisir kebutuhan akan SDM pengawasan, BPKP mengoptimalkan Pengawasan Berbantuan Komputer dengan Aplikasi Audit Command Language (ACL) untuk pengolahan data. Di Wilayah DKI Jakarta, BPKP juga mulai menjajaki pelaksanaan Audit dengan Partisipasi Masyarakat, dengan melibatkan aparat RT, RW untuk melakukan pengawasan atas Ketepatan Sasaran, Kualitas dan Kuantitas Bantuan Sosial yang diterima, dan melaporkannya kepada BPKP. Sementara di Level Perwakilan BPKP, penugasan dilakukan dengan melibatkan seluruh bidang pengawasan.

5. Apa kendala yang dihadapi dalam penugasan pengawasan bantuan sosial?

Jawab:

Kendala Pertama adalah Permasalahan terkait Pembatasan Sosial yang mempersulit Tim BPKP untuk melakukan pengawasan ke Lapangan, Kendala kedua adalah ketersediaan SDM dan Anggaran, Kendala Ketiga adalah Kendala terkait kelancaran data dan informasi mengenai penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah.

6. Upaya apa yang telah dilakukan untuk memastikan kegiatan bantuan sosial tepat sasaran?

Jawab:

Seluruh pengawasan yang dilakukan oleh BPKP telah mencakup aspek ketepatan sasaran sebagai salah satu Tentative Audit Objective (TAO)-nya, dimana pengujian untuk pembuktian TEO tersebut, dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengujian Data untuk Memastikan Bahwa KPM Penerima Bantuan Sosial telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Melakukan Pengujian Data untuk Memastikan bahwa NIK KPM telah Valid dan Tidak Tumpang Tindih atau Ganda;
3. Melakukan Pengujian Lapangan untuk menilai Kelayakan Penerima Bantuan Sosial dari sisi Kondisi Sosial Ekonomi KPM.
4. Melakukan konfirmasi kepada Aparat RT, RW setempat untuk memastikan Kelayakan KPM untuk menerima bantuan sosial

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Hanri Jan Piter, lahir di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 April 1987. Merupakan anak Ke-4 dari lima bersaudara dari pasangan D.Simatupang dan Ibu M. Siregar. Peneliti sudah berkeluarga dengan istri Tiurma Situmeang dan dikaruniai satu orang putri, yang saat ini tinggal di wilayah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 06 Pondok Labu lulus pada tahun 1999, SMP Negeri 37 Jakarta lulus pada tahun 2002, SMK PGRI 14 Jakarta lulus pada tahun 2005, dan Pendidikan

Sarjana (S-1) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Persada Indonesia Y.A.I lulus pada tahun 2010 pada tahun 2020 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan.

Peneliti mengawali Karir sebagai Karyawan BUMN sebagai staff akuntansi di Perum Perikanan Indonesia (Persero) di Lamongan Jawa timur pada tahun 2011 sampai 2012. Pada tahun 2012 Peneliti mendapatkan kesempatan bekerja pada Perusahaan Asing di PT. KIA Keramics, Tbk dengan diberi amanah Jabatan menjadi Supervisor Accounting sampai 2014, setelah itu peneliti memutuskan mengabdikan sebagai Pengawai Negeri di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang penempatannya di Jambi.